

BAB V

KESIMPULAN

Penjajahan Jepang atas Korea Selatan yang berlangsung selama 35 tahun antara tahun 1910-1945 telah menimbulkan luka sejarah yang mendalam bagi bangsa Korea. Salah satu permasalahan sejarah yang sampai saat ini masih menjadi isu diplomatik bagi kedua negara adalah berkaitan dengan *jugun ianfu*. *Jugun Ianfu* atau *comfort woman* merupakan sebuah istilah sejarah yang digunakan untuk merujuk pada wanita-wanita yang pada masa perang dipaksa untuk bekerja di rumah bordil sebagai pelayan bagi para tentara Jepang. Mereka biasanya dipaksa untuk memberikan kebutuhan seksual kepada para tentara kekaisaran Jepang di rumah bordil yang juga disebut dengan *comfort stations*.

Isu *jugun ianfu* sendiri telah dibahas selama kurang lebih 25 tahun semenjak mulai diangkat ke publik pada awal tahun 1990 an. Sebelum akhirnya kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui *Agreement On Comfort Woman* pada tahun 2015. Perjanjian tersebut berhasil tercapai ketika Korea Selatan berada di bawah kepemimpinan Presiden Park Geun-hye yang merupakan Presiden ke 11 dan merupakan Presiden wanita pertama di negara tersebut. Walaupun pada awal masa pemerintahannya Presiden Park sempat menunjukkan sifat kerasnya terhadap Jepang, namun secara mengejutkan akhirnya Korea Selatan berhasil melakukan kompromi terkait dengan isu tersebut dan mencapai kesepakatan bersama dengan pemerintah Jepang. Tercapainya perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang terkait dengan isu *jugun ianfu* juga menandai telah terselesaikannya permasalahan dan juga tuntutan dari Korea Selatan atas

Jepang terkait isu tersebut. Penyelesaian isu *jugun ianfu* yang pada awalnya dianggap akan sulit tercapai antara kedua belah pihak karena keduanya yang tidak saling berkompromi dan tetap pada perspektifnya masing-masing membuat penyelesaian isu ini setidaknya akan membutuhkan waktu negosiasi yang lebih lama dibandingkan dengan isu lainnya. Namun, melalui beberapa pertimbangan dan juga negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara baik secara terbuka maupun tertutup akhirnya menghasilkan perjanjian yang tercapai lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan.

Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan Korea Selatan untuk mempercepat penyelesaian isu *jugun ianfu* adalah karena adanya tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkup domestik dan internasional. Selain itu juga tidak terlepas dari peran individu yaitu Presiden Park Geun-hye. Secara lebih jelas akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Cara pandang Presiden Park yang menganggap bahwa masalah keamanan merupakan hal mendesak yang harus segera diselesaikan. Hal ini berkaitan dengan provokasi yang dilakukan oleh pihak Korea Utara di awal masa jabatannya. Hal inilah yang kemudian semakin memperkuat asumsi Presiden Park Geun-hye yang juga memiliki trauma masa lalu atas kematian sang ibu oleh agen Korea Utara untuk menjadikan negara tersebut sebagai fokus utama dari kebijakan luar negerinya. Salah satu upaya untuk mencegah ancaman dari Korea Utara adalah dengan memperkuat kerjasama regionalnya dengan Jepang dan Amerika Serikat. Park sangat menyadari bahwa permasalahan yang membelit kedua negara terkait sejarah hingga mengakibatkan hubungan keduanya mencapai titik terendah harus segera diselesaikan. Dengan gaya

kepemimpinan Park Geun-hye yang ditandai dengan kerahasiaan, Park mengutus orang kepercayaannya yaitu kepala staf Presiden Lee Byung-kee untuk melakukan diskusi bersama dengan kepala Dewan Keamanan Nasional Jepang yang dilakukan secara tertutup dan rahasia terkait dengan masalah *jugun ianfu*. Dengan keahlian Lee Byung-kee dalam urusan luar negeri dan keamanan akhirnya perjanjian tersebut berhasil dicapai dengan pertimbangan akan pentingnya penguatan kerjasama keamanan antar Korea Selatan dengan negara aliansinya.

2. Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengeluarkan Dua Keputusan Yudisial penting salah satunya berkaitan dengan isu sejarah yang melibatkan Korea Selatan-Jepang. Dalam putusannya, Pengadilan menyimpulkan bahwa kegagalan pemerintah Korea Selatan untuk mengikuti prosedur penyelesaian dan mencapai resolusi atas perselisihan terkait sejarah yang melibatkan kedua negara merupakan kelalaian tindakan dari pihak pemerintah Korea Selatan. Tindakan tersebut selanjutnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara sebagaimana dipastikan di bawah Konstitusi. Dengan demikian, keputusan tersebut juga mengindikasikan bahwa tindakan kelambanan yang ditunjukkan oleh pemerintah Korea Selatan adalah tindakan yang inkonstitusional. Hal inilah yang kemudian yang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Presiden Korea Selatan untuk mengadopsi sikap yang semakin kuat terhadap resolusi masalah wanita penghibur atau *jugun ianfu* sesegera mungkin.
3. Kesuksesan dari perjanjian ini tidak terlepas dari peran Amerika Serikat terutama dari Pemerintahan Obama yang juga terus mendorong dan menekan

kedua negara aliansinya secara terus-menerus untuk segera menyelesaikan permasalahan yang bisa mengganggu hubungan kedua negara tersebut. Amerika secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk Korea Selatan dan Jepang agar bisa segera mencapai kesepakatan terkait isu *jugun ianfu* dan juga menekan kedua negara untuk segera membuat konsesi yang diperlukan. Pihak Amerika juga secara terang-terang menyampaikan janjinya untuk bisa memperkuat dan membangun kerjasama keamanan trilateral yang lebih kuat bersama kedua negara aliansinya tersebut sebagai bagian dari kebijakan penyeimbangan strategisnya ke Asia terutama untuk menghadapi provokasi Korea Utara. Kontribusi penting Amerika Serikat dalam tercapainya perjanjian ini adalah memulai inisiatif untuk mempertemukan kedua pemimpin negara. Presiden Obama kemudian membawa kedua pemimpin tersebut bersama untuk pertemuan puncak trilateral pada bulan Maret 2014 di sela-sela KTT Keamanan Nuklir di Den Haag. Melalui pertemuan tersebut, Amerika telah berhasil membuka jalur komunikasi antara Presiden Park dan Abe yang akhirnya membuka jalan bagi tercapainya perjanjian.